



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA BLORA

DENGAN

BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

Nomor : W11-A32/1146/HM.01.1/VII/2022

Nomor : W.13.AHU.AHU1.HH.05.05-26/VII/2022



TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

PENCARI KEADILAN DALAM PERKARA PERMOHONAN

PENETAPAN PERWALIAN

PENGADILAN AGAMA BLORA

JULI 2022



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BLORA
DENGAN
BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG**



Nomor : W11-A32/1146/HM.01.1/VII/ 2022

Nomor : W.13.AHU.AHU1.HH.05.05-26/VII/2022

**TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN
HUKUM KEPADA MASYARAKAT PENCARI KEADILAN DALAM
PERWALIAN/PENGAMPUAN**

Pada hari ini Rabu tanggal dua pulu tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Supriyanto, S.Ag., M.S.I.
NIP : 197406071998031002
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Blora
Alamat : Jl. Raya Blora - Cepu Km. 3 Blora
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Blora untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

2. Nama : Hendra Andy Satya Gurning, S.H., M.H.
NIP : 19750529 200112 1 001
Jabatan : Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang
Alamat : Jl. Hanoman Raya No. 25, Semarang
Bertindak untuk dan atas nama Balai Harta Peninggalan Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bermaksud mengadakan perjanjian kerjasama tentang **PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT PENCARI**

KEADILAN DALAM PERWALIAN/PENGAMPUAN, dalam hal ini sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

Dasar Perjanjian Kerjasama adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
- (6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- (7) Nota Kesepahaman Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor : W13.HH.05.05-44 dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W11-A/4073/HM.01.1/X/2021 tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Di Bidang Peradilan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Pencari Keadilan;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah **Perkara Permohonan Penetapan Perwalian/Pengampunan dan tindak lanjut pelaksanaannya.**

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak Pertama berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan atas perkara permohonan perwalian /pengampunan yang diputus Pengadilan Agama Blora untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pihak Kedua;
- (2) Pihak Pertama berkewajiban memberikan informasi atas penetapan perkara permohonan perwalian/pengampunan berupa petikan penetapan kepada Pihak Kedua;
- (3) Pihak Kedua berkewajiban memberikan informasi tindak lanjut dari perkara permohonan perwalian/pengampunan yang diputus Pengadilan Agama Blora kepada Pihak Pertama;
- (4) Para Pihak saling mendapatkan informasi atas perkembangan hukum terkait dengan perwalian/pengampunan.

Pasal 5

SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan

dilaksanakan dengan baik;

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. Hakim pada Pengadilan Agama;
 - b. Aparatur Sipil Negara yang berada dilingkungan **PARA PIHAK**; dan
 - c. Pemangku Kepentingan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan/atau berakhir karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Blora maupun Balai Harta Peninggalan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.



Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan/atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati oleh **PARA PIHAK** dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA


Pengadilan Agama Blora

SUPRIYANTO, S.Ag., M.S.I.

PIHAK KEDUA


Balai Harta Peninggalan Semarang

HENDRA ANDY SATYA GURNING, S.H., M.H.